

**PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DALAM MENINGKATKAN SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS 1
TEHNIK KOMPUTER DAN JARINGAN DI SMK NEGERI I KASIMAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH
RETNO KHUKUH WULANDARI
NIM 15220004



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN SIKAP
NASIONALISME SISWA KELAS 1 TEKNIK KOMPUTER
DAN JARINGAN DI SMK NEGERI 1 KASIMAN SAMBENG
KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh
RETNO KHUKUH WULANDARI
NIM 15220004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 20 Agustus
2019 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima Sebagai
kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

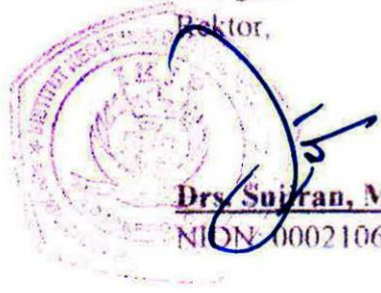
Dewan Penguji

Ketua : Drs. Heru Ismaya, M.H
Sekretaris : Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H
Anggota : 1. Dr. Ifa Khoiria Ningrum, SE.M.M.
2. Drs. Heru Ismaya, M.H
3. Ali Mujahidin, S.Pd.MM.



Mengesahkan:

Dektor,



Drs. Sujran, M.Pd.

NIDN: 0002106302

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan bertujuan menanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi negara Indonesia serta membina dan mengembangkan sikap nasionalisme dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat kenyataan sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda rasa nasionalisme dan cinta tanah airnya sudah mulai luntur bahkan terkikis dari dalam dirinya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya remaja Indonesia yang lebih senang meniru gaya hidup orang barat dalam berbagai hal, lebih senang dan bangga menggunakan produk luar negeri dari pada produk dalam negeri sendiri karena dianggap modern apabila menggunakan produk luar negeri.

Menurut Kusumawati (2011) terkikisnya rasa nasionalisme sekarang ini juga melanda anak didik di sekolah. Contoh riilnya saja hampir disetiap jenjang sekolah, ketika dilaksanakan upacara bendera para siswa merasa malas dan tidak melaksanakannya dengan khidmat dan tertib. Apabila mereka sadar dan paham bagaimana perjuangan pahlawan ketika merebut negara Indonesia dari tangan penjajah maka mereka akan mengikuti upacara dengan baik atas dorongan dalam dirinya bukan karena takut dihukum guru. Selain itu, siswa sekolah sekarang ini lebih suka menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya

dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan remaja sekarang juga lebih merasa bangga dengan menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri sendiri.

Namun yang harus menjadi titik sentral dalam diri anak bangsa saat ini adalah pengembangan sikap nasionalisme yang menumbuhkan jiwa bangsa berbangsa dan bernegara. Dengan demikian sikap dipandang sebagai pengarah atau penuntun suatu perilaku individu dalam merefleksikan tindakan terhadap suatu obyek. Sikap didahului oleh keyakinan terhadap obyek yang ditanggapi.

Larry Winecoff (Knikker, 1977) menyebutkan; *“Man’s attitude are formed as he ascribes valence (positive or negative) to object”, only a few of these carry a strong enough valence determine to ward the object*”. Hal ini dimaksudkan bahwa sikap berkaitan dengan sistem nilai yang dianut oleh seseorang. Dengan keterkaitan yang kuat atas sesuatu sistem nilai tertentu, seseorang akan menjadikannya sebagai *“central value”* dalam menentukan sikapnya terhadap sesuatu.

Sementara itu, trifungsi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti yang dikemukakan oleh Djahiri (1996) adalah sebagai berikut:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum dan melek pembangunan serta melek permasalahan diri, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Membina pembekalan siswa (substansial dan potensi dirinya) untuk belajar lebih lanjut. Dari tujuan dan fungsinya jelas bahwa PPKn ingin menanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat terhadap prinsip dan

semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi negara Indonesia serta membina dan mengembangkan sikap semangat nasionalisme dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Krisis identitas nasionalisme di negara kita pada era global ini, maka kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mewujudkan identitas nasional dan nasionalisme dapat ditanamkan kepada para siswa sebagai warga negara yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara dimasa depan. Nasionalisme sebagai salah satu paham untuk mengingatkan generasi muda akan kegigihan usaha para pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jasa para pahlawan memang harus dikenang, namun dikenang saja tidaklah cukup. Karena perjuangan belumlah selesai, para pahlawan bangsa yang telah gugur tentu akan bangga bila perjuangan mereka diteruskan oleh generasi saat ini. Agar dapat meneruskan perjuangan mereka, generasi muda harus meneladani sikap nasionalisme mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme, salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Materi-materi yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan diantaranya meliputi: Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi pertama. Materi tersebut diharapkan mampu memberikan kesadaran nilai-nilai

nasionalisme dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme merupakan salah satu materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai nasionalisme sejak dini terhadap siswa-siswi di sekolah.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme pada siswa di sekolah dimaksudkan untuk menciptakan generasi penerus yang sadar akan rasa nasionalisme. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana amanat kurikulum harus menghasilkan perubahan perilaku yang lebih matang secara psikologis dan sosiokultural, khususnya sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan seperti diatas, maka peneliti merumuskan judul penelitian “ PERAN GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENINGKATKAN SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS 1 DI SMK NEGERI I KASIMAN SAMBENG -BOJONEGORO TAHUN AJARAN 2018/2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran guru PPKn dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro?
2. Bagaimana sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan guru PPKn dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro.
2. Mengetahui peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan guru PPKn dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan pemikiran dan menambah wawasan kepada para pendidik dalam menanamkan nilai nasionalisme kepada siswa.
- b. Hasil penelitian ini akan menjadi acuan guna menambah pengetahuan dalam rangka menyempurnakan aspek pembelajaran khususnya dalam menanamkan nilai nasionalisme.
- c. Hasil penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme siswa kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Bojonegoro.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi dasar dalam bersikap untuk mengembangkan nilai-nilai nasionalisme, sehingga dapat menjadi warga Negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara.
- 2) Meningkatkan rasa kebangsaan dan Cinta Tanah Air.

b. Bagi Guru

- 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam menyampaikan pembelajaran, sehingga dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya terpusat dalam pengembangan intelektual saja, tetapi juga pengembangan nilai dan keterampilan.
- 2) Memberikan sumbangan informasi kepada guru pendidikan kewarganegaraan dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk meningkatkan sikap nasionalisme sebaik mungkin kepada siswa.

c. Bagi kepala sekolah,

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan program-program yang dapat direncanakan untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai nasionalisme siswa.

d. Bagi Penulis

Memberi bekal pengetahuan penulis berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa.

e. Bagi peneliti yang lain,

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain mengenai pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme.

1.5 Devinisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan variabel-variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian membatasi pengertian dari setiap variabel sebagai berikut :

1.5.1 Peran

Peran atau peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soekamto, 1982).

1.5.2 Guru Pendidikan dan Kewarganegaraan

Menurut undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003:24) bahwa : pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Guru PPKn yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang berwenang dan ditugasi mengajar bidang studi PPKn.

1.5.3 Kinerja Guru Pendidikan dan Kewarganegaraan

Kinerja guru PPKn yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan aktualisasi dari pekerjaannya dalam memerankan peranannya sebagai pendidik,

pengajar, pelatih dan pembimbing siswa dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan pelatihan sebagai komitmen pada profesinya.

1.5.4 Nasionalisme

Kata nasional berasal dari kata *nation* dari bahasa Inggris yang artinya bangsa. Hans Kohn menyebutkan bahwa "*Nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*", artinya nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Aman,2011:38).

1.5.5 Siswa

Peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu (UUSPN, 2003:3).

1.5.6 Sikap

Dalam arti yang sempit sikap adalah pandangan atau kenderungan mental. Menurut Bruno (1987), sikap (*attitude*) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu (Syah,2008:120).

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

Bagian ini akan membahas tentang teori-teori yang dapat mendukung penelitian, yang diambil dari buku atau jurnal dan referensi yang lainnya. Teori-teori yang akan dijelaskan pada bagian ini yaitu tentang sikap (pemahaman, penghayatan, pelaksanaan), nasionalisme, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

2.1.1 Pengertian Peran dan Sikap

2.1.1.1 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dari hal diatas dapat kita lihat lebih lanjut bahwa pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakkan hukum mempunyai arti penegakkan hukum secara total enforcment, yaitu penegakkan hukum secara penuh, Soekanto (1978: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, Soerjono Soekanto (2002:243). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 hal, yaitu :

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan

seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang peran, Miftah Thoha (1997).

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, E.St. Harahap, dkk (2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.

Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya, Syiful Bahri Djamarah (1997:31).

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu perangkat tingkah laku atau tindakan seseorang dalam memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Seseorang menjalankan peranan apabila ia melaksanakan hak dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kurang berhasilnya suatu peranan. Dalam ilmu sosial ketidak berhasilan ini terwujud dalam kegagalan

peran, kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya.

2.1.1.2 Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya, Syiful Bahri Djamarah (1997:31). UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah: “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Tugas guru selain dari memberikan ilmu pengetahuan juga memberikan pendidikan dalam bidang moral pada anak didik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang diatas. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap perbuatan guru sehari-hari, apakah ada yang patut diteladani atau tidak, apakah dapat dijadikan panutan atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, memberikan dorongan dan arahan pada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian, berbicara, serta bergaul dengan siswanya, ataupun teman-temannya dalam kehidupan bermasyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Guru merupakan unsur aparatur Negara dan abdi Negara. Karena itu guru perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan kebijakan pemerintah

tersebut. Untuk itu, semuanya diatur dalam kode etik guru Indonesia. Dengan demikian guru diharapkan untuk mampu berbakti kepada Negara sebagai suatu profesi kependidikan yang mulia.

Guru yang berbakti adalah guru yang mampu membentuk peserta didik berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami seorang guru dalam menjalankan tugasnya yakni tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dibaca dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yakni membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, Selain mengajarkan pengetahuan dan perkembangan intelektual, guru juga harus memperhatikan perkembangan moral, jasmani rohani dan lain-lain yang sesuai dengan hakikat pendidikan.

Hakikat pendidikan dalam hal ini yaitu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/ keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan :

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan kompetensi guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang bersifat khusus: (Permendiknas No. 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru) meliputi:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
2. Memahami substansi pendidikan kewarganegaraan PPKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Keunikan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan digambarkan John Potter, dalam *Citizenship Education* substansinya berisikan tentang hak – hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain, (*Linked with other subject*), maksudnya sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran yang lain, (*A way of life*), maksudnya PPKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah

secara keseluruhan dan (*Participation*), maksudnya PPKn memerlukan generasi muda (*young people*) untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata.

Komponen substansi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan meliputi: pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Dengan demikian PPKn telah memiliki kawasan pembelajaran sendiri yang khas. Hal ini disebabkan dalam Taksonomi Bloom, Karakter merupakan aspek afektif, padahal karakter tidak hanya memiliki dimensi sikap tetapi juga perilaku/tindakan yang telah menjadi watak/perilaku sehari-hari.

Begitu pula ketrampilan kewarganegaraan yang pada intinya merupakan ketrampilan partisipasi /ketrampilan sosial termasuk di dalamnya ketrampilan intelektual yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Hal inilah yang merupakan latar belakang mengapa pendidikan kewarganegaraan harus memiliki kawasan pembelajaran yang merupakan komponen substansi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri.

2.1.1.3 Sikap

Sikap menurut Mulyono (1990: 838) adalah perbuatan yang berdasar pada pendirian atau pendapat/keyakinan sebagai kecenderungan untuk bertindak. Didefinisikan sikap menurut Syah (1995: 135) adalah gejala internal yang berdimensi afektif yang berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap orang atau barang baik secara positif maupun negatif. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan yang mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut (Berkowitz dalam Anwar, 1988: 5). Sikap sebagai gejala internal berperan dalam mengambil tindakan, terutama bila ada

kemungkinan untuk bertindak. Seseorang yang memiliki sikap jelas, mampu untuk memilih secara tegas dalam menghadapi kemungkinan.

Azwar (2011: 4) mengatakan bahwa dalam sikap terdapat aspek yang saling berhubungan, yaitu: aspek kognitif, afektif, dan konatif. Aspek kognitif berupa apa yang dipercayai atau kepercayaan seseorang mengenai objek sikap. Kemudian aspek afektif merupakan komponen perasaan yang menyangkut masalah emosi, sedangkan aspek konatif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada didalam diri seseorang yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Penelitian ini, aspek kognitif yang diukur adalah pemahaman. Kemudian untuk aspek afektif yaitu penghayatan, sedangkan aspek konatif yang diukur adalah pelaksanaan.

2.1.2 Tinjauan Nilai Nasionalisme

2.1.2.1 Pengertian Nilai

Menurut Winarno (2010:3) Nilai adalah hal yang bersifat abstrak, artinya nilai tidak dapat ditangkap melalui indra. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.

Sejalan dengan itu Sajarkawi (2006:29) mengungkapkan bahawa nilai merupakan kualitas suatu hal yang dapat menjadikan suatu hal dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai serta dapat menjadi objek kepentingan. Nilai merupakan suatu yang tidak hanya diyakini melainkan suatu yang menjiwai tindakan seseorang. Nilai seseorang selalu diukur melalui tindakan yang telah

dilakukannya. Nilai-nilai ini merupakan bagian kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang melakukan tindakan haruslah sesuai dengan seperangkat nilai-nilai baik nilai yang telah tertulis di masyarakat maupun belum. Sedangkan menurut Rukiyati dkk (2008:58) nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi sesuatu akan mengandung nilai apabila ada sifat atau kualitas padanya. Misalnya motor itu bagus, orang itu baik. Motor dan orang adalah objek yang didalamnya terdapat kualitas yaitu bagus dan baik.

Menurut pandangan Notonegoro dalam Sajarkawi (2006:31) terdapat tiga nilai yang perlu diperhatikan serta menjadi pegangan masyarakat Indonesia yaitu

- a. Nilai materiil adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur kehidupan manusia.
- b. Nilai vital adalah sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktifitas sehari-hari.
- c. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya nilai adalah hal yang bersifat abstrak yang tidak dapat ditangkap melalui indra dan merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi pada dasarnya nilai tidak dapat dilihat maupun dirasakan oleh indra manusia. Apabila suatu objek memiliki sifat atau kualitas yang baik maka dapat dikatakan objek itu bernilai positif. Pada dasarnya Nilai merupakan suatu yang tidak hanya diyakini melainkan suatu yang menjwai tindakan seseorang. Nilai seseorang selalu diukur melalui tindakan yang telah dilakukannya, sehingga segala tindakan seseorang haruslah didasari dengan nilai-nilai yang sesuai dan telah berlaku di masyarakat.

2.1.2.2 Pengertian Nasionalisme

Jika ditinjau secara etimologis nasionalisme berasal dari bahasa latin *nation* yang berarti bangsa yang dipersatukan. Menurut Sunarso dkk (2008:36) nasionalisme adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Istilah nasionalisme pertama kali digunakan di Jerman pada abad ke-15 oleh mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama. Kata tersebut untuk menunjukkan perasaan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka (Ritter dalam Adisusilo, 2012:73). Dengan demikian, penggunaan istilah nasionalisme adalah sebagai representasi perasaan cinta seseorang (mahasiswa dari luar Jerman) terhadap bangsa, bahasa dan daerah asal mereka.

Penggunaan istilah nasionalisme dalam perkembangannya mengalami perubahan, dimana sejak revolusi Perancis meletus 1789. Sejak saat itu, istilah nasionalisme menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat. Keragaman makna itu dapat dilihat dari sejumlah pendapat berikut. Smith (2012:11) memaknai nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kesatuan dan identitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk suatu bangsa yang sesungguhnya atau bangsa yang potensial.

Sementara itu, Anderson (2008:13) memahami nasionalisme sebagai komunitas khayalan (*imagined community*) yang disatukan oleh sebuah persahabatan yang mendalam di mana anggota-anggotanya diyakini menciptakan sebuah kesatuan yang utuh dan kuat. Menurut Anderson, mengingat bahwa anggota-anggota dari nasion itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama

lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan kelompok bersama. Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam arti positif) manusia yang juga hidup dan berdinamika, nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut, naik turun.

Sedangkan menurut Rukiyati (2008:69) nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Karena kuatnya rasa yang dimiliki maka timbullah rasa cinta bangsa dan tanah air.

Berdasarkan uraian di atas, nasionalisme dalam sejarahnya digunakan untuk beberapa hal antara lain:

- a. Untuk mewakili perasaan rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.
- b. Sebagai representasi suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.
- c. Sebagai wujud kesediaan untuk menjadi bagian dari organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa
- d. Sebagai dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.
- e. Sebagai doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif.

Dalam konteks nasionalisme Indonesia, Anderson (2008:14) mengatakan bahwa nasionalisme dalam pengertian tradisional masih sangat dibutuhkan. Saat ini terdapat sinyalemen yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan terkikisnya nasionalisme atau semakin berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih di

kalangan mereka yang kaya dan berpendidikan. Anderson menganjurkan untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalis sebagaimana yang dulu hidup secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan dan revolusi. Ia mengusulkan dibinanya semangat “nasionalisme kerakyatan” yang sifatnya bukan elitis melainkan memihak ke masyarakat luas, khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan. Salah satu ciri pokok dari nasionalisme kerakyatan itu adalah semakin kuatnya rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa.

Sikap nasionalisme (*nationhood*) yang akan dituju dalam pendidikan nasionalisme, pada dasarnya telah dimiliki oleh masyarakat dan bangsa (*nation*) dan negara bangsa (*nation state*) yang diperoleh sehari-hari dari pendidikan di sekolah dan pengalaman pergaulan kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Visi nasionalisme Indonesia pada masa pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan orientasinya mewujudkan kemerdekaan sehingga ciri dan jiwa nasionalisme adalah anti kolonial. Setelah bangsa Indonesia mengalami kemajuan dalam pendidikan dan intelektualitas relevan dengan proses pembangunan maka visi nasionalisme menuntut perubahan paradigma dan sikap kebangsaan yang baru, artinya konsep nasionalisme pada masa kini perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan (Muhammad Takdir Ilahi, 2012:17).

Adapun menurut Azyumardi Azra (dalam Lan dan Manan, 2012:21) mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia masih terus mengalami perubahan sebagai hasil dialektika, baik dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri maupun dengan perubahan-perubahan pada tingkat global. Dalam kerangka itu, kita melihat setidaknya tiga tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Tahap pertama adalah

pertumbuhan awal dan kristalisasi gagasan nasionalisme. Fase ini ditandai penyerapan gagasan nasionalisme yang selanjutnya diikuti pembentukan organisasi-organisasi yang disebut. Kemunculan dan pertumbuhan proto-nasionalisme, dalam banyak hal, merupakan konsekuensi dari perubahan-perubahan cepat dan berdampak luas yang berlangsung di Indonesia dan banyak negara lain umumnya pada dekade-dekade awal abad 20. Menurut Sunarso (2008) juga mengatakan nasionalisme bagi bangsa Indonesia merupakan suatu paham yang menyatukan pelbagai suku bangsa dan pelbagai keturunan bangsa asing dalam wadah kesatuan negara Republik Indonesia.

Jadi pada intinya nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, sehingga akan muncul perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Dalam paradigma baru tentang nasionalisme, nasionalisme harus diartikan sebagai bentuk orientasi pemikiran bangsa yang memberikan wawasan dan bimbingan bangsa untuk secara terus menerus mencapai kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai bidang kebanggaan dan kehormatan bangsa. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu orientasi pemikiran yang dapat dipakai untuk mempertahankan serta menanggulangi segala tantangan dan kesulitan yang dihadapi bangsa pada saat ini atau masa yang akan datang.

Dengan demikian sikap kebangsaan yang harus dibangun kembali pada saat ini perlu dilandasi dengan persepsi dan konsepsi nasionalisme baru dan juga pemahaman terhadap konsep ikatan bangsa itu sendiri yang berwawasan sosial, budaya, ekonomi, dan sains.

2.1.2.3 Kajian Nilai Nasionalisme

Menurut Ki Supriyoko (2001:2) nilai yang terkandung dalam nasionalisme Indonesia seperti persatuan dan kesatuan, perasaan senasib, toleransi, kekeluargaan, tanggung jawab, sopan santun dan gotong royong. Hal senada juga diungkapkan oleh Lailatus Sa" diyah (2012:48) bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang juga berpengaruh pada pembentukan sikap nasionalisme diantaranya: nasionalisme, tanggung jawab, disiplin, toleransi, kerja keras dan peduli sosial.

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari nilai nasionalisme yaitu.

- a. Memiliki toleransi
- b. Memiliki kedisiplinan
- c. Memiliki tanggung jawab
- d. Memiliki kerja keras
- e. Memiliki sopan santun
- f. Memiliki sikap gotong royong dan peduli sosial

Dari berbagai pendapat yang terdapat pada pengertian nilai dan pengertian nasionalisme, dapat dikaji bahwasanya nilai nasionalisme yakni rasa cinta terhadap tanah air serta sikap untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa, sehingga akan muncul perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Adapun bentuk dari nilai nasionalisme yaitu memiliki toleransi, memiliki kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, memiliki kerja keras, memiliki sopan santun, dan memiliki sikap peduli sosial.

Akan tetapi melihat kondisi banyaknya penyimpangan di kalangan remaja dan generasi muda saat ini yang begitu kuat, tentu ini menjadikan tugas yang diberikan kepada para pendidik dan perancang di dalam penanaman nilai nasionalisme sangat berat. Banyak generasi muda yang mulai kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Dilihat dari sikap, banyak generasi muda yang tingkah lakunya tidak mengenal sopan santun dan cenderung memiliki rasa tidak peduli terhadap lingkungan. Pengaruh-pengaruh tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang.

Arti penting dari implementasi terhadap penanaman nilai-nilai nasionalisme adalah menjaga tiap-tiap individu dari pengaruh luar yang semakin mudah seiring berkembangnya era globalisasi saat ini. Tidak semua kemajuan di era globalisasi sekarang ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki sikap nasionalisme, tentunya semua lapisan masyarakat tidak menginginkan pengaruh negatif masuk ke dalam diri generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari bangsa Indonesia sendiri untuk berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme. Kesadaran dalam berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari yang jarang ditemui tersebut menjadi beberapa kendala yang dialami oleh pendidik dalam penanaman nilai nasionalisme. Maka dari itu dalam pengembangan strategi penanaman nilai nasionalisme harus diupayakan seoptimal dan sedini mungkin.

2.1.2.4 Nasionalisme Indonesia

Di Indonesia nasionalisme juga tercermin dari ideologi bangsa yang dimiliki yakni Pancasila. Menurut Arif Rohman (2009: 42) mengemukakan ideologi Pancasila memiliki lima prinsip nilai yang bersifat dasar (*staat fundamental norms*) yang merupakan ajaran dasar yang dipedomani oleh seluruh warga bangsa baik dalam tataran individu maupun kelompok. Kelima nilai dasar itu adalah sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan. Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari misalnya saling menghormati, memberi kesempatan dan kebebasan menjalankan ibadah, serta tidak memaksakan atau kepercayaan pada orang lain. Melalui pelaksanaan sila yang pertama ini bangsa Indonesia menghendaki keutuhan dan kebersamaan dengan cara saling menghormati. b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab bangsa Indonesia mengakui, menghargai dan memberikan hak dan kebebasannya yang sama pada tiap warganya, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hak-hak orang lain untuk menjaga toleransi.

c. Persatuan Indonesia

Pada sila persatuan Indonesia bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pelaksanaannya dalam kehidupan dengan cara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan golongan, suku, atau individu. Sila yang ketiga ini menegaskan komitmen dan pendirian

warga negara untuk mengutamakan, memperhatikan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara.

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Pada sila yang keempat bangsa Indonesia mengakui untuk mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak dilaksanakan dengan cara musawarah mufakat. Pelaksanaan musawarah mufakat ini untuk menghargai perbedaan pendapat.

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sila yang kelima bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan hasil usahanya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh merugikan orang lain.

Rukiyati, dkk (2008: 69) menjabarkan pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila ketiga, yaitu:

- a. Nasionalisme
- b. Cinta bangsa dan tanah air
- c. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit
- e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan

Selain itu (Sunarso, dkk, 2008: 39) mengungkapkan bahwa nasionalisme Indonesia disebut juga dengan nasionalisme Pancasila, yaitu paham kebangsaan yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia tercermin dalam dasar negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima nilai dasar yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia dituangkan dalam pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, agama, adat istiadat dan kepercayaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang bersemboyan “Bhineka Tunggal Ika”

2.1.3 Pelaksanaan Penanaman Nilai Nasionalisme di Sekolah

Dalam melaksanakan penanaman nilai nasionalisme di sekolah ada 2 cara yang bisa dilakukan yaitu:

2.1.3.1 Melalui Kegiatan Pembelajaran

Mulyasa (2003:100) mengatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Sedangkan menurut Syaiful Sagala (2006:61) mengatakan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa atau murid. Pendidik yang baik akan melakukan komunikasi dua arah atau timbal balik dan memancing siswa untuk

belajar secara aktif sehingga dapat terjadi proses komunikasi yang diinginkan. Masih dalam bukunya Syaiful Sagala (2006:61) pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. Selain itu menurut Nasution (1998:25), tujuan pembelajaran dibagi menjadi tiga kategori yaitu: kognitif (kemampuan intelektual), afektif (perkembangan moral), dan psikomotor (keterampilan).

Dari berbagai pendapat diatas dapat diartikan bahwasanya pembelajaran adalah penciptaan suatu sistem lingkungan yang didalamnya terdapat proses komunikasi dua arah sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan dapat mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. kegiatan pembelajaran memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Selain itu kegiatan pembelajaran juga memiliki peran dalam mengembangkan aspek afektif siswa, adapun aspek afektif meliputi perkembangan sikap, perilaku, moral dan salah satunya karakter tentang nasionalisme. Penanaman nilai nasionalisme dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Proses penanaman nilai nasionalisme melalui kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya bisa dengan menintegrasikan nilai nasionalisme kedalam mata pelajaran.

2.1.3.2 Melalui Kegiatan di Luar Pembelajaran

Pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme selain melalui kegiatan pembelajaran juga dapat dilakukan melalui kegiatan di luar pembelajaran. Adapun Kemendiknas (2010: 8) memaparkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan terdiri atas berbagai kegiatan. Adapun kegiatan tersebut yaitu:

- a. Integrasi ke dalam kegiatan belajar mengajar,
- b. Pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan
- c. Integrasi ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan
- d. Penerapan pembiasaan kehidupan di rumah yang selaras dengan di satuan pendidikan.

Sejalan dengan itu Zubaedi (2011: 17) memaparkan pendapatnya bahwa penanaman karakter proses, contoh keteladanan, pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan siswa dalam lingkungan sekolah. Sehingga nilai-nilai nasionalisme dapat dipahami dan ditanamkan dalam diri siswa. Adapun menurut Mulyasa (2012: 168-169) pembiasaan dalam kehidupan keseharian di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, dan keteladanan. Sri Narwanti (2011: 55) menambahkan pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme melalui kegiatan ko-kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan di luar pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler misalnya pramuka, latihan tari dan musik daerah, Pelatihan baris berbaris (PBB), dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahawsanya pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah dengan pembiasaan dalam kehidupan keseharian di sekolah. Pembiasaan dalam kehidupan keseharian disekolah dapat dilakukan dengan cara kegiatan rutin, kegiatan spontan dan keteladanan. Selain itu bisa juga dilakukan dengan mengintegrasikan kedalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan pramuka, latihan tari, dll. Semua kegiatan tersebut akan terlaksana apabila guru ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. sehingga guru dapat menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku bagi

para siswa-siswanya. Tentu saja sikap dan perilaku guru harus mencerminkan nilai-nilai nasionalisme yang ada. Sehingga proses pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme bisa berjalan dengan baik.

2.1.4 Hambatan Pelaksanaan Penanaman Nilai Nasionalisme di Sekolah

Dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di sekolah, akan ada hambatan-hambatan yang kemungkinan akan muncul. Sehingga hambatan tersebut dapat mengakibatkan proses penanaman nilai nasionalisme yang dilakukan di sekolah akan menjadi tidak maksimal. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.4.1 Hambatan Kompetensi

Guru sebagai pendidik bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran kepada siswa, selain itu guru juga bertugas dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Adapun nilai karakter yang ditanamkan kepada siswa salah satunya adalah nilai nasionalisme. Dalam menanamkan nilai nasionalisme guru memiliki peran yang sangat penting. Nilai nasionalisme dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran. Untuk melaksanakan penanaman nilai nasionalisme melalui kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki kompetensi.

Menurut Nana Sudjana (2002: 18) kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga bidang, yaitu kompetensi bidang kognitif, kompetensi bidang sikap, dan kompetensi perilaku/ performance. Dalam kompetensi bidang kognitif guru diharuskan memiliki kemampuan intelektual seperti, menguasai mata pelajaran serta mengintegrasikannya dengan penanaman nilai-nilai nasionalisme yang ada.

Dalam kompetensi bidang sikap guru dituntut memiliki sikap yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Tentu sikap yang dimaksud adalah sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Sedangkan dalam kompetensi prilaku dan performance guru dituntut untuk memiliki berperilaku/ keterampilan, seperti keterampilan mengajar, ketrampilan menyusun persiapan/perencanaan mengajar, dan lain-lain. Apabila guru tidak memiliki kompetensi-kompetensi tersebut tentu dalam melaksanakan penanaman nilai nasionalisme akan mengalami hambatan-hambatan.

Berdasarkan uraian di atas kemampuan guru dalam menguasai mata pelajaran serta mengintegrasikannya kedalam nilai-nilai nasionalisme sangatlah penting. Selain itu ketrampilan mengajar dan ketrampilan menyusun persiapan perencanaan mengajar juga sangat penting. Karena hal tersebut yang diperlukan dalam melaksanakan penanaman nilai nasionalisme. Guru juga dituntut untuk menjadi suri tauladan ataupun panutan dalam melaksanakan nilai nasionalisme di sekolah. Jadi seorang guru harus memiliki kompetensi dalam bidang intelektual, kompetensi dalam bidang sikap maupun kompetensi prilaku untuk mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme kedalam kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga hambatan-hambatan dalam bidang kompetensipun bisa di minimalisir.

2.1.4.2 Hambatan Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu perangkat yang akan membantu proses kegiatan pendidikan yang akan berlangsung di sekolah. Kurikulum dengan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 19 “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut terdapat kurikulum yang baik, maka tujuan yang akan dicapai dari pendidikan tersebut akan terwujud. Sedangkan apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut terdapat kurikulum yang buruk, maka tujuan yang diinginkanpun akan sulit tercapai.

Menurut Oemar Hamalik (2009: 20-21) menyatakan bahwa pada dasarnya betapapun baiknya suatu kurikulum, berhasil atau tidaknya akan sangat bergantung pada tindakan-tindakan guru di sekolah dalam melaksanakan kurikulum. Sehingga penilaian baik atau buruknya kurikulum hanya dapat dilihat dari proses pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran, karena yang melaksanakan suatu kurikulum adalah guru.

Sedangkan menurut Muhamad Nurdin (2005: 38) mengungkapkan beban kurikulum yang dipikul oleh guru sangat padat bahkan terjadi “pemaksaan” dalam dua hal, yaitu alokasi waktu yang terbatas dan daya serap siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Alokasi waktu yang diberikan tidak sesuai dengan beban kurikulum yang harus diselesaikan guru.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pedoman dalam proses melaksanakan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga hanya dengan kurikulum yang baik pembelajaran dan

pendidikan akan berjalan dengan lancar. Sedangkan beban berat yang ditimbulkan kurikulum mengakibatkan guru hanya memprioritaskan aspek

pengetahuan kepada siswa. sehingga aspek kepribadian dan sikapnya tidak menjadi prioritas guru. Itu disebabkan karena alokasi waktu yang diberikan kepada guru tidak sesuai dengan beban kurikulum yang harus diselesaikan guru. Tentu apabila dalam pendidikan guru hanya memprioritaskan aspek pengetahuan dan melupakan aspek kepribadian dan sikap, ini akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di sekolah. Karena dalam penanaman nilai nasionalisme selain terdapat aspek pengetahuan juga terdapat aspek pengembangan sikap dan kepribadian.

2.1.4.3 Hambatan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2) sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Adapun menurut Suharsimi Arikunto (1993: 81-82) sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar dan segala sesuatu yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan tertentu. Sehingga guru dan siswa dapat terbantu dalam proses pembelajaran. Sarana prasarana merupakan hal yang sangat pokok dalam proses pendidikan.

Dalam proses pendidikan, pendidik dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana. Agar pendidik mampu meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga tercipta keserasian, kenyamanan

yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki bagi warga sekolah. Mulyasa (2002: 49) mengatakan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran.

Dari berbagai pendapat di atas dapat di artikan bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana merupakan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta minimnya penguasaan administrasi pendidik dalam menggunakan sarana dan prasarana, ini tentu akan menghambat proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu penanaman nilai nasionalisme yang diinginkan akan terhambat. Akan tetapi apabila sarana dan prasarana pendidikan memadai tentu ini akan membuat kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien serta lebih mudah dan penanaman nilai nasionalisme akan berjalan dengan baik.

2.1.4.4 Hambatan Lingkungan

Menurut Mulyasa (2003:100) pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Pembelajaran sungguh sangat erat

kaitannya dengan lingkungan. Siswa dan sekolah membutuhkan lingkungan dalam proses pembelajaran.

Sedangkan menurut Raka Joni dalam Supriadi Saputro dkk (2000:1) menyebutkan, pembelajaran adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya belajar. Penciptaan sistem lingkungan dalam hal ini berarti guru, sekolah, keluarga dan yang bersangkutan dengan siswa menciptakan kondisi dimana siswa dapat terangsang melakukan aktivitas belajar. Hal ini tentu menunjukkan faktor lingkungan merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran.

Lingkungan sebagai dasar dari pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam tercapainya tujuan pendidikan. Menurut peraturan dasar perguruan nasional taman siswa (Putusan Kongres X tanggal 5-10 Desember 1966) pasal 15 dalam bukunya Nana Syaodih (2001: 41) ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, taman siswa melaksanakan kerja sama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan yaitu:

- a. Lingkungan keluarga
- b. Lingkungan perguruan
- c. Lingkungan masyarakat

M Dalyono (2009: 130) menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini keadaan ekonomi serta kemampuan orang tua merawat juga sangat besar pengaruhnya pada perkembangan jasmani anak. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua besar pengaruhnya pada perkembangan rohani anak terutama

kepribadian dan kemajuan pendidikan anak. Pada hakikatnya lingkungan pendidikan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

Teori pembelajaran konstruktivisme mengajarkan, bahwa siswa harus dapat membangaun pemahaman sendiri tentang konsep yang diambil dari sumber – sumber pembelajaran yang berasal dari lingkungan disekitarnya. Secara umum lingkungan pendidikan berfungsi untuk membantu siswa dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan disekitarnya, utamanya berbagai sumberdaya pendidikan yang tersedia. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwasnya lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Selain itu faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Dalam menanamkan nilai nasionalisme di sekolah tentu diperlukan peran serta dari keluarga. Lingkungan keluarga tersebut yang paling mempengaruhi penanaman nilai dan perkembangan karakter anak. Maka dari itu selain sekolah, keluarga juga dituntut untuk aktif ikut berperan serta dalam membimbing anak – anak. Karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Keluarga dituntut untuk memberikan contoh serta tauladan yang baik kepada para anak – anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Masyarakat juga demikian, diharapkan dapat berperan serta dalam memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak – anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berkesinambungan dengan lingkungan keluarga dan masyarakat dan proses penanaman nilai nasionalisme juga dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya hambatan dalam pelaksanaan pendidikan meliputi beberapa faktor, yaitu hambatan kompetensi, hambatan kurikulum, hambatan sarana dan prasarana, dan hambatan lingkungan. Tentunya dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di sekolah hambatan tersebut harus di minimisir sehingga proses penanaman nilai nasionalisme di sekolah bisa berjalan dengan baik.

2.1.5 Sikap Nasionalisme

Sikap nasionalisme merupakan sikap dan tingkah laku siswa yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negara (Aman,2011:141). Secara operasional sikap nasionalisme dapat didefinisikan sebagai sikap cinta tanah air, yang artinya mereka mencintai dan mau membangun tanah air menjadi lebih baik. Sikap yang sesuai dengan nasionalisme diantaranya sebagai berikut, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, setia memakai produksi dalam negeri, rela berkorban demi bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa dan bernegara Indonesia, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi, berprestasi dalam berbagai bidang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dan setia kepada bangsa dan negara terutama dalam menghadapi masuknya dampak negatif globalisasi ke Indonesia.

Nasionalisme siswa dapat dilihat dari tingkah lakunya. Adapun sikap atau tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Siswa merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia.
2. Siswa mampu menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
3. Siswa giat belajar untuk menghadapi tantangan di era globalisasi

4. Siswa mempunyai rasa tolong menolong kepada sesamanya yang membutuhkan.
5. Mencintai produk dalam negeri.
6. Menjenguk teman yang sakit.
7. Menghormatibapak ibu guru disekolah.
8. Menghormati teman disekolah.
9. Tidak memasakan pendapat kepada orang lain.

Menurut Aman (2011:141) dalam bukunya mengemukakan bahwa ada beberapa indikator sikap nasionalisme sebagai berikut,

- a. Bangga sebagai bangsa Indonesia
- b. Cinta tanah air dan bangsa
- c. Rela berkorban demi bangsa
- d. Menerima kemajemukan
- e. Bangga pada budaya yang beragam
- f. Menghargai jasa para pahlawan
- g. Mengutamakan kepentingan umum

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti ini memiliki hubungan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah:

2.2.1 Penelitian tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yayuk (2015) melakukan penelitian tentang “Peran guru PPKn di SMAN 1 Mojosari dalam membentuk sikap cinta pada tanah air”. Dengan melakukan beberapa hal yaitu: *pertama*, mengingatkan, guru PPKn di SMAN 1 Mojosari

senantiasa mengingatkan untuk tidak lupa dengan jati diri bangsa Indonesia.

Siswa-siswa juga harus pandai memfilterisasi budaya yang masuk di Indonesia apakah sudah sesuai dengan budaya Indonesia. Menyukai budaya dari negara lain boleh sebagai tambahan pengetahuan dan informasi tetapi janganlah lupa untuk menjunjung tinggi budaya Indonesia. Dengan begitu rasa cinta kepada tanah air akan dimiliki oleh setiap siswa. *Kedua*, memberi contoh, guru PPKn di SMAN 1 Mojosari memberi contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Memakai baju batik dan menggunakan produk dari dalam negeri merupakan salah satu bentuk cinta kepada tanah air.

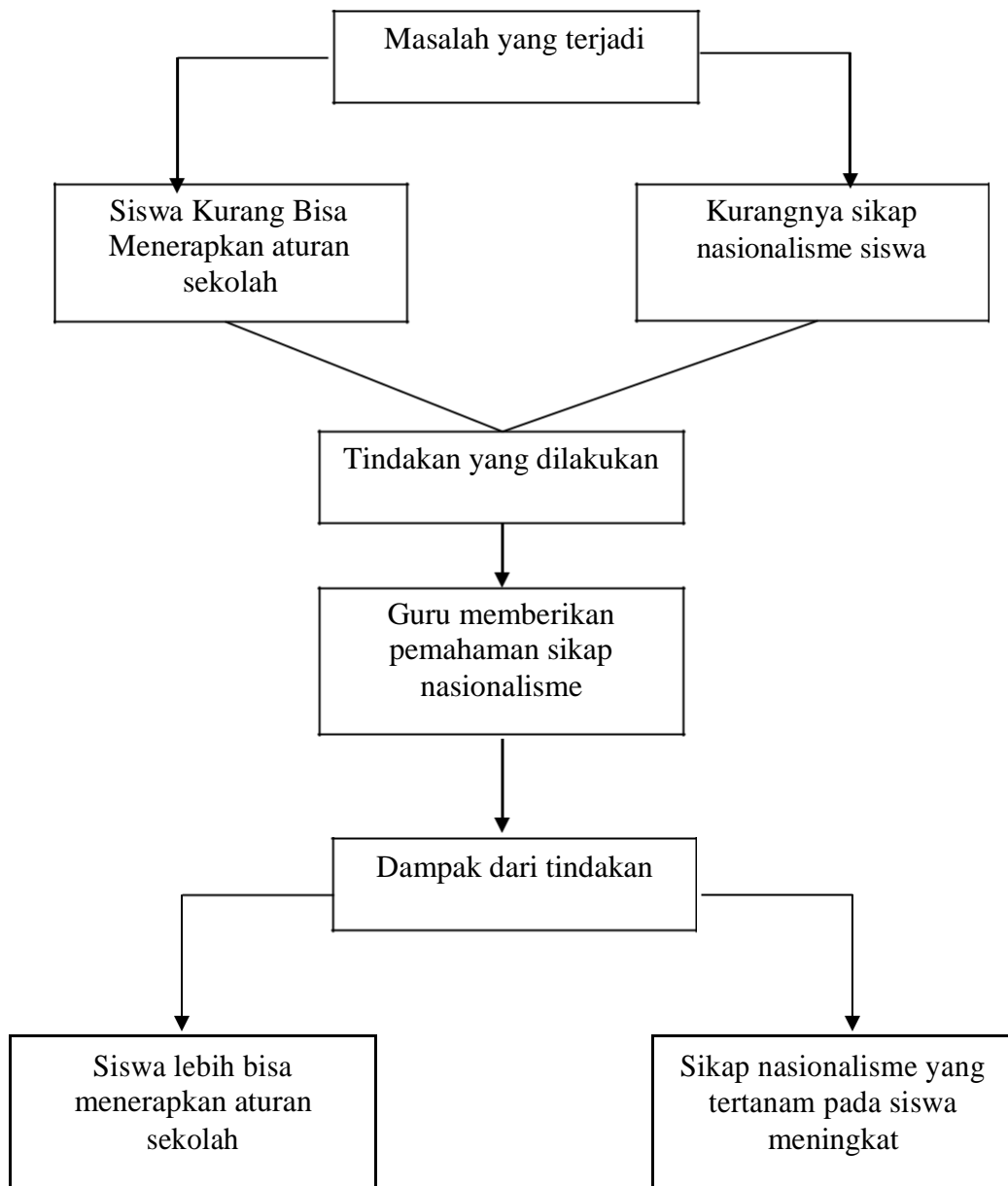
2.2.2 Penelitian tentang sikap nasionalisme

Penelitian yang Relevan Penelitian yang dilakukan oleh Meliana (2011). Skripsi: Universitas Negeri Padang dengan judul "Pengaruh PPKn Dalam Megembangkan Sikap Nasionalisme Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Di SMA Negeri 13 Padang". Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa sikap cinta tanah air rata-rata bersikap setuju dengan presentase 54,11%, sikap persatuan dan kesatuan rata-rata 56,3%, siswa bersikap setuju sedangkan untuk sikap rela berkorban 50,3%, rata-rata siswa bersikap setuju, sikap pantang menyerah rata-rata siswa bersikap setuju yaitu 51,7%, dari beberapa indikator diatas rata-rata sikap nasionalisme siswa adalah 53,1% bersikap setuju dengan sikap nasionalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap cinta tanah air, sikap persatuan dan kesatuan, sikap rela berkorban dan sikap pantang menyerah siswa SMA Negeri 13 Padang bersikap setuju. Hal ini membuktikan bahwa sikap yang dimiliki siswa di SMA Negeri 13 Padang terbilang baik.

2.2.3 Perbedaan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Siswa kelas 1 TKJ di SMK Negeri Kasiman Mempunyai sifat nasionalisme seperti menjaga ketertiban didalam kelas dan mematuhi aturan yang berlaku di dalam kelas maupun di dalam lingkup sekolah. Sedangkan penelitian oleh Meliana (2011) Sikap nasionalisme siswa Di SMA Negeri 13 Padang siswa mempunyai sifat nasionalisme , cinta tanah air, Sikap persatuan dan kesatuan, sikap rela berkorban dan sikap pantang menyerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan sebagai arahan dalam pelaksanaan penelitian, terutama untuk memahami alur pemikiran, sehingga analisis yang dilakukan lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir juga bertujuan memberikan keterpaduan dan keterkaitan anatar fokus penelitian yang diteliti, sehingga menghasilkan satu pemahaman yang utuh dan berkesinambungan. Namun kerangka pikir ini tetap lentur dan terbuka, sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan secara sederhana, kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1. Skema kerangka berpikir

Dalam pembelajaran guru diharapkan berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta membentuk manusia Indonesia agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta pada tanah air.

Dalam proses pembelajaran, guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharuskan mengajarkan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada peserta didik.

Guru adalah faktor yang sangat penting dalam pembelajaran. Dengan demikian, nilai-nilai nasionalisme yang diajarkan guru dapat diterima dan dimaknai oleh peserta didik dengan tujuan agar setiap peserta didik mempunyai sikap nasionalisme dan menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

2.4 Hipotesis Tindakan

2.4.1 Penerapan sikap nasionalisme dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan melalui tahap pemberian masalah, diskusi, identifikasi, analisis, pencarian informasi, dan presentasi.

2.4.2 Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan materi nasionalisme dapat meningkatkan sikap nasionalisme kelas 1 di SMK Negeri 1 Sambeng Kasiman Bojonegoro.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1 TKJ di SMK Negeri 1 Kasiman Kabupaten Bojonegor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Lexy J. Moleong, (2016: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. pendapat ini di kemukakan oleh Lexy J. Moleong, (2016: 168).

3.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas 1 TKJ di SMK Negeri Kasiman Kabupaten Bojonegoro

3.4 Sumber Data

Menurut (Wiratna Sujarwean, 2014: 73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sedangkan menurut Lofland dalam (Lexy J. Moleong, 2016: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber dari siswa atau menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara peneliti dengan nara sumber dan melakukan pengamatan. Dari penelitian ini peneliti mengambil sumber data melalui siswa Kelas X TKJ di SMK Negeri Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dalam 1 kelas di kelas X TKJ di SMK Negeri Kasiman. Beberapa sumber data dalam penelitian ini adalah, antara lain:

1. Informan

Sumber data yang pertama adalah informan. Sumber data diperoleh melalui kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan

bertanya (Moleong,2006:157). Informan yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai sumber data dipilih untuk mendapatkan data tentang deskripsi SMK Negeri I Kasiman Bojonegoro terkait visi dan misi sekolah. Selain itu, juga untuk mendapatkan data tentang program-program sekolah yang terkait dengan pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di sekolah dan juga hambatan yang dihadapi.

2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan.

Bapak Sigit Subiantoro, S.Pd selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 1 dan beberapa siswa dan siswi kelas 1 SMK Negeri I Kasiman. Informan dari guru dan siswa dipilih untuk mengetahui peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa kelas 1. Data yang didapatkan dari guru dan siswa kemudian dibandingkan untuk mengetahui derajat kepercayaan (kredibilitas) data yang diperoleh.

3. Perwakilan Siswa

Siswa sebagai sumber data dalam pelaksanaan penanaman nilai nasionalisme di dalam kegiatan belajar maupun di luar kegiatan pembelajaran. Pemilihan siswa berdasarkan tingkat kemampuan akademik siswa yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Siswa yang dijadikan sumber data

adalah siswa kelas 1 teknik komputer dan jaringan. Subjek penelitian pada tahap wawancara sebanyak 26 siswa.

4. Dokumen

Sumber data yang selanjutnya adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan dilapangan, seperti dokumen sekolah, foto, dan sebagainya. Dokumen merupakan sumber data pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dipercaya (Sugiyono,2010:329).

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 1 Kasiman, Jl. Wonosari, Sambeng Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2019 hingga Juli tahun 2019 yang berawal dari pengajuan izin penelitian. Surat izin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro. Melalui Surat izin tersebut memulai penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakil-wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Guru-guru wali kelas, pengawas sekolah, serta ketua komite sekolah dalam kurun waktu Februari 2019 hingga Juli tahun 2019. Pengamatan terhadap sarana dan prasarana, aktifitas manajemen dalam implementasi juga dilakukan selama periode tersebut.

3.6 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 1 di SMK Negeri I Kasiman Sambeng Kabupaten Bojonegoro jurusan teknik komputer dan jaringan. Jumlah siswa kelas 1 adalah 36, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 26

perempuan. Siswa kelas 1 SMK Negeri I Kasiman memiliki sikap nasionalisme yang rendah.

3.7 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, maka metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi atau Pengamatan

Menurut Marshall dalam Sugiono (2010:310) menyatakan bahwa *through observation, the researcher learn about behavior an the meaning attached to those behavior*. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif, dengan demikian data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkatan makna dari setiap perilaku yang tampak. Susan stainback dalam Sugiyono (2010:331) menyatakan *in participant observation the researcher observes what people do, listent to what they say, and participates in their activities* maksudnya dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan sikap nasionalisme siswa SMK Negeri 1 Kasiman.

Melalui pengamatan maka peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan alasan:

- a) Untuk mengetes kebenaran informasi karena ditanyakan langsung kepada subjek secara lebih dekat.
- b) Untuk mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.

2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut, *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono,2010:317).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada informan yang benar-benar dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Sugiono menyatakan bahwa wawancara semistruktur merupakan jenis wawancara yang termasuk dalam kategori *in dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapatnya serta ide-idenya (Sugiyono,2010:320).

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan siswa SMK Negeri 1 Kasiman. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu adanya alat untuk mencatat data, dalam hal ini peneliti menggunakan handphone yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara tersebut. Peneliti juga memerlukan buku sebagai alat tambahan, selain itu juga berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan camera digital untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik (Sugiyono, 2010.329). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan hasil lembar kerja siswa. Teknik dokumentasi

digunakan untuk mencari data-data yang mendukung permasalahan yang akan diteliti.

3.8 Teknik Analisis Data, Evaluasi dan Refleksi

Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2010:248).

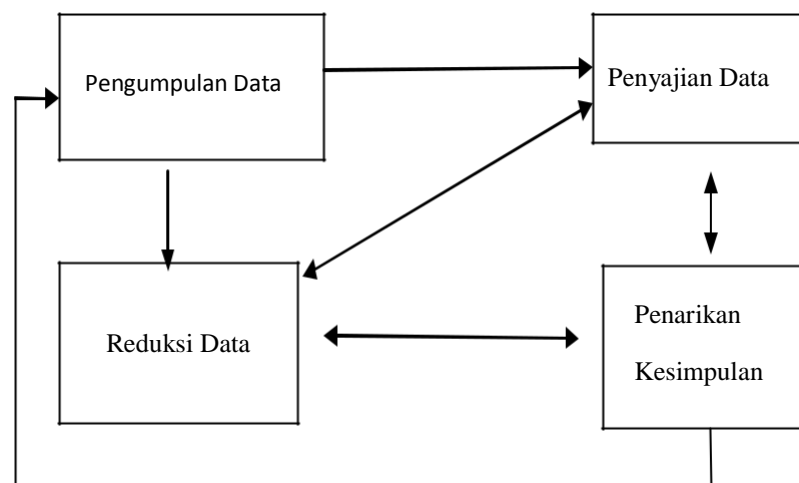
Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010:335).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai penelitian di lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi peneliti selanjutnya jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono 2010:336).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan setelah dianalisis

dianggap belum lengkap, maka peneliti akan melanjutkan memberi pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu diperoleh data yang lebih kredibel (Sugiyono, 2010:337).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau *interactive analysis models*, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komponen-komponen analisis model interaksi (Miles,2009:20).

Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*data Collection*)

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data dilapangan.

2. Reduksi data (*data Reduction*)

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Sugiyono (2010:338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

Pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa sikap nasionalisme siswa dalam bentuk kata-kata sesuai adanya di lapangan. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berfikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri.

Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. Penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam bentuk kalimat faktual saja tetapi berupa paragraf penuh. Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.

3. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam

pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan kesimpulan atau *verification*

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *verification* ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.